

Menyudahi Kontroversi Sejarah SO 1 Maret 1949

Bagian Pertama
dari Dua Tulisan

Oleh: Hendra Kurniawan

YOGYAKARTA menjadi kota yang sarat dengan peristiwa sejarah. Kota ini telah menorehkan banyak cerita dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara di masa revolusi. Saat itu pula, kota budaya ini menjadi saksi atas upaya menunjukkan eksistensi Republik di mata dunia internasional. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak mendapat pengakuan oleh Belanda. Bersama dengan masuknya pasukan Sekutu yang bertujuan melucuti tentara Jepang, tentara Belanda turut membonceng guna mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Belanda melancarkan Agresi Militer yang disebutnya sebagai Aksi Polisionil sebanyak dua kali. Sebutan Aksi Polisionil lebih didasari oleh asumsi Belanda bahwa wilayah yang ditertibkannya itu dianggap masih di bawah kekuasaannya.

Agresi Militer pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 yang kemudian membuat ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Agresi Militer Belanda yang kedua atau Operasi Gagak dilancarkan terhadap kota Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948.

Serangan ini membuat para pemimpin Republik yang baru seumur jagung itu ditangkep dan diasingkan ke luar Jawa. Para pemimpin sipil sebenarnya memiliki siasat bahwa penahanan mereka oleh Belanda tentu akan menarik perhatian dunia internasional dengan demikian akan muncul kecaman-kecaman terhadap Belanda. Akan tetapi pihak militer

justru menganggap hal ini sebagai wujud kekalahan para pemimpin sipil. Perbedaan pemikiran ini nantinya akan semakin mempertajam konflik antara sipil dengan militer di masa revolusi. Dengan ditahannya para pemimpin sipil, membuat militer merasa perlu melakukan gerakan demi tetap tegaknya Republik.

Pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 pagi tepat, sirene di atas menara besi samping Pasar Beringharjo berbunyi nyaring. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari sejak tiga bulan terakhir, semenjak Belanda menduduki kota Yogyakarta, bunyi sirene menjadi penanda berakhirnya jam malam yang dimulai pukul 21.00 hingga 06.00. Biasanya setelah bunyi sirene berakhir, maka penduduk akan segera memulai aktivitasnya. Pagi itu suasana berbeda, begitu sirene berhenti meraung, langsung disambungi oleh suara ledakan dan tembakan yang ditujukan ke pos-pos pertahanan tentara Belanda. Letkol Soeharto, Komandan Wehrkreise III, memimpin dua ribu anak buahnya melancarkan pertempuran yang dikenal sebagai Serangan Oemoem 1 Maret 1949.

Dukungan pasukan Republik di wilayah-wilayah sekitar Yogyakarta juga sangat berpengaruh. Pasukan Republik di Kulonoprogo, Purworejo, Kebumen, Megelang, dan Klaten berhasil mencegah datangnya bantuan tentara Belanda ke Yogyakarta. Demikian pula dengan warga Yogyakarta yang bahu-membahu menyiapkan makanan untuk para gerilyawan. Mereka berbaur dengan tentara Republik memenuhi jalan-jalan utama kota.

Selain ketangguhan tempur

pasukan Republik dan dukungan warga masyarakat, ada hal lain yang juga mendukung kesuksesan serangan. Salah satunya yang menarik dalam tulisan Julius Pour (2009) mengungkapkan kecerdikan Letkol Soeharto yang berinisiatif mengirimkan berita serangan melalui pemancar gerilya yang tersembunyi di Desa Plajen, Gunungkidul. Sebuah pertempuran di pedalaman Pulau Jawa tahun 1949 dapat menjadi berita internasional yang dipancarkan stasiun radio dan koran-koran di segala penjuru dunia saat itu. Ini menjadi keberhasilan dari sisi politis untuk mencuri perhatian negara-negara luar agar dapat menekan pihak Belanda.

Meskipun membenarkan fakta adanya pemberitaan kemenangan Serangan Oemoem ke luar negeri, namun Michael Wood (2013) dalam bukunya justru mempertanyakan hal itu dari sudut pandang yang berbeda. Wood meragukan pengetahuan mengenai dunia luar dan kecerdasan politik yang dimiliki Letkol Soeharto dalam memahami konsekuensi global dari aksi yang direncanakannya. Wood masih belum yakin benar apabila konseptor serangan apalagi hingga inisiatif untuk memberitakan serangan ke luar negeri datang dari Soeharto. Hal ini tentu semakin memperuncing kontroversi yang hingga kini masih menyelimuti sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949.

Janur Kuning dan Serangan Fajar

Kontroversi sejarah mengenai Serangan Oemoem 1 Maret 1949 muncul cukup lama sejak Orde Baru tumbang. Semasa Orde Baru diajar-

kan dalam sejarah bahwa konseptor serangan ini adalah Letkol Soeharto. Untuk semakin mengukuhkan hal ini, maka dua monumen didirikan di Yogyakarta yaitu Monumen Serangan Oemoem 1 Maret di depan Kantor Pos Yogyakarta dan Monumen Jogja Kembali (Monjali) di Ring Road Utara Yogyakarta. Tidak hanya itu, dua film berjudul *Janur Kuning* (1979) dan *Serangan Fajar* (1981) dibuat untuk menonjolkan peran Soeharto dalam peristiwa bersejarah tersebut.

Soeharto memang harus diakui memiliki peran yang tidak kecil dalam Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Akan tetapi sangat disayangkan apabila peran penting tokoh lain yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam peristiwa ini pernah dilupakan. Beberapa minggu sebelum serangan, Sri Sultan HB IX telah berkirim surat dengan Jenderal Soedirman yang sedang bergerilya untuk meminta izin mengadakan serangan terhadap kekuatan Belanda di Yogyakarta pada siang hari. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi pendapat Dewan Keamanan PBB yang bersidang pada bulan Maret 1949. Usulan ini disetujui dan kemudian disarankan agar Sri Sultan HB IX berhubungan langsung dengan Letkol Soeharto untuk membicarakan lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

Kemampuan Sri Sultan HB IX dalam menyusun strategi tentu tidak dapat diragukan begitu saja. Sri Sultan HB IX yang lulusan dari Universiteit Leiden tentu mampu memahami berbagai siaran radio berbahasa asing untuk memantau situasi internasional. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah USD Jogja.

Menyudahi Kontroversi Sejarah SO 1 Maret 1949

Bagian Terakhir
dari Dua Tulisan

Oleh: Hendra Kurniawan

SRI Sultan HB IX saat itu selain sebagai Raja Yogyakarta sekaligus Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjabat sebagai Menteri Negara Koordinator Keamanan. Sri Sultan HB IX mampu menangkap, berbagai informasi penting mengenai sengketa Indonesia-Belanda yang saat itu menjadi sorotan negara-negara di dunia termasuk PBB. Sri Sultan HB IX sebagai menteri juga menjalin komunikasi yang intens dengan Jenderal Soedirman selaku Panglima TNI. Posisi yang istimewa inilah membuat Sri Sultan HB IX mampu menggabungkan aksi-aksi militer yang dilakukan oleh pasukan Republik dengan kegiatan diplomasi di luar negeri.

Mencermati berbagai analisis macam ini, maka kontroversi sejarah mengenai Serangan Oemoem 1 Maret 1949 pertama-tama dijernihkan dengan menampilkan peran Sri Sultan HB IX sebagai konseptor serangan. Peran Letkol Soeharto juga dikembalikan sesuai porsinya sebagai pelaksana operasi di lapangan. Pertemuan antara Sri Sultan HB IX dengan Letkol Soeharto di bulan Februari 1949 sebagaimana yang disarankan oleh Jenderal Soedirman perlu diungkap lebih jelas. Pertemu-

an ini tentu diadakan oleh Sri Sultan HB IX untuk menyampaikan gagasannya mengenai rencana serangan umum di bulan Maret 1949 kepada Letkol Soeharto selaku penguasa daerah militer yang meliputi wilayah Yogyakarta.

Jika kemampuan Sri Sultan HB IX dalam hal strategi dan analisis politiknya tidak dapat dipungkiri, maka kemampuan Letkol Soeharto sebagai perwira yang handal dalam hal siasat perang juga tidak dapat dikesampingkan. Letkol Soeharto dengan baiknya merancang taktik serangan dan gerak pasukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu usai pertemuannya dengan Sri Sultan HB IX hingga dilancarkannya serangan tanggal 1 Maret 1949. Pendek kata hanya sekitar dua sampai tiga minggu waktu yang tersedia bagi Letkol Soeharto menyusun siasat penyerangan ke pos-pos pertahanan dan tempat-tempat vital yang diduduki oleh pasukan Belanda. Keberhasilan pasukan Republik menduduki kota Yogyakarta meskipun hanya selama enam jam saja sudah menjadi pukulan telak bagi pasukan Belanda saat itu. Di sisi lain kesuksesan serangan ini juga membuka mata dunia terhadap eksistensi negara yang baru saja berdiri, se-

hingga dukungan kemudian mengalir bagi Indonesia sementara Belanda justru menuai kecaman.

Menggali makna

Kini sudah 65 tahun peristiwa sejarah yang memiliki arti penting bagi perjalanan Republik ini berlalu. Kontroversi dan berbagai analisis dalam upaya mengungkap kebenaran sejarah peristiwa ini bolehlah tetap berlangsung. Akan tetapi sebagai sebuah bangsa besar yang lahir melalui perjuangan yang tidak mudah dan pengorbanan yang tidak sedikit, ada baiknya apabila generasi muda saat ini diajak untuk memaknai Serangan Oemoem 1 Maret 1949 ketimbang memperbincangkan kontroversinya tanpa akhir. Salah satunya bahwa keberhasilan serangan ini dilandasi oleh semangat persatuan seluruh elemen bangsa, baik itu para pemimpin sipil, kekuatan militer, dan potensi rakyat.

Sri Sultan HB IX dan Soeharto menjadi tokoh-tokoh yang berhasil memadukan antara keahlian berdiplomasi terhadap pihak luar dengan perjuangan bersenjata di dalam negeri. Di sini juga dapat ditemukan adanya supremasi sipil terhadap militer yang sudah dibina sejak negara ini baru lahir. Sri Sultan HB IX sebagai tokoh sipil mampu

menghadirkan gagasan dan kebijakan yang luar biasa di saat kawan-kawan sesama pemimpin sipil ditawan oleh Belanda. Sri Sultan HB IX juga menyadari kedudukannya sebagai Raja Yogyakarta yang saat itu memiliki posisi tawar tinggi dan kewibawaan di mata pemimpin-pemimpin Belanda. Sementara itu Letkol Soeharto juga hadir dengan jiwanya sebagai tentara sejati yang mampu menerjemahkan dengan baik gagasan dari Sri Sultan HB IX. Letkol Soeharto berhasil menyatukan kekuatan militer melalui operasi lapangan yang sedemikian kompak dan tangguh sehingga berhasil meraih kemenangan.

Sikap negarawan sejati yang dihadirkan oleh kedua orang tokoh inilah yang sangat diperlukan bagi bangsa saat ini. Para pemimpin bangsa perlu kembali pada cita-cita Proklamasi dan semangat revolusi yang dulu pernah bergelora untuk bersama-sama menumpas kolonialisme. Mudah-mudahan pemilu mendatang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang berkomitmen tinggi untuk menanggalkan semua keinginan menonjolkan diri sendiri dan mencari keuntungan pribadi. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.